

Overview Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengembangan Pariwisata Di Kepulauan Anambas

Etika khairina^a, Renita Kurnia^b, Diki Zukriadi^c, M. Andika Surya Lebang^d, Padrisan Jamba^e

^{ab}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

^{cde}Program Studi Ilmu Hukum Negara, Universitas Putera Batam

*etika@puterabatam.ac.id, diki@puterabatam.ac.id, andika@puterabatam.ac.id, padrisan@puterabatam.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the implementation of tourism development in the Anambas Islands to increase the number of tourist visits. The research method is descriptive qualitative, primary data sources are interviews and observations. Secondary resources are reviews of relevant literature and documentation from the Anambas Cultural Tourism Office. The data analysis technique is Triangulation. Factors influencing implementation can be seen from the theory developed by Van Metter and Van Horn, namely policy standards and targets, resources, communication, characteristics of implementing agents, and social, political, and economic conditions. The regulations governing Anambas Islands tourism are included in the National Tourism Destination (DPN) development plan through the 2010-2025 National Tourism Development Master Plan (RIPPARNAS), which is directed at tourism development which is difficult to achieve policy program targets, this is because in the regulations There are no Standard Operating Procedures available in tourism development itself, so that SOPs in regulations become one of the influential obstacles. Then, synergy between the government and the community is needed in implementing the tourism development of the Anambas Islands.

Keywords: Implementation factors, development, tourism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan pariwisata di kepulauan anambas sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif, sumber data primer ialah wawancara, observasi. Sumber data sekunder ialah tinjauan literatur yang relevan dan dokumentasi dari dinas pariwisata kebudayaan anambas, Teknik analisis data yang digunakan Triangulasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dilihat dari teori yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang paling mempengaruhi ialah kebijakan yang mengatur target, sasaran pariwisata kepulauan anambas. Regulasi yang mengatur pariwisata Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010- 2025, yang di arahkan pada pembangunan pariwisata sulit mencapai target/sasaran program kebijakan, hal tersebut dikarenakan dalam peraturan tersebut tidak tersedia Standart Operasional Prosedur dalam pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga SOP dalam regulasi menjadi salah satu kendala yang berpengaruh. kemudain dibutuhkan sinergitas dari pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata kepulauan anambas.

Kata kunci: Faktor implementasi, Pengembangan, Pariwisata.

1. Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang memberikan modal besar dalam sektor pariwisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan kebudayaan Anambas, tahun 2020 terdapat 199 objek wisata dengan rincian 76% (150) objek wisata alam, 44% (44) Objek wisata budaya dan 2% (4) objek wisata buatan manusia.

Potensi alam yang menjadi ikon kepulauan anambas diantaranya ialah Pantai Padang Melang, Pulau Penjalin, Pulau Mangkian Panjang, Pulau Rengek, Pulau Durai. Dukungan lainnya yang menjadikan kepulauan anambas dapat dikembangkan dalam industri pariwisata ialah letak geografis kepulauan anambas yang strategis. Kepulauan Anambas menjadi jalur pelayaran dunia internasional berbatasan langsung dengan Negara Singapura, pada jalur

pengembangan New Regional, Cruis Corridors dari Singapura, manila, Hongkong.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah (Amiruddin, 2017; Wulung, 2021). Dengan potensi wisata alam dan budaya yang beraneka ragam, dapat mendorong Anambas menjadi salah satu industri penyumbang devisa bagi perekonomian nasional. menurut (Edy Susanto, 2019) Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan berperan penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu Negara/ Daerah.

Menurut (Amin et al., 2020) industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan daerah. Secara global sektor pariwisata dari Tahun 2017 telah berkontribusi mengubah kehidupan masyarakat di beberapa daerah karena sektor pariwisata telah mampu melahirkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi sesama masyarakat. mengingat dampak cakupan pariwisata yang begitu luas multiplier Effect.

Kepulauan Anambas merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010–2025 Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difokuskan pada pengembangan pariwisata. Diketahui berdasarkan data dians pariwisata kepulauan anambas, jumlah kunjungan di Tahun 2022 mencapai 28.077 wisatawan baik lokal dan mancanegara. Jumlah tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya seperti karimun, Batam, Tanjung Pinang, Bintan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kepulauan Anambas. Hal ini Mengacu pada salah satu program prioritas kementerian pariwisata bahwa dalam mendorong percepatan pembangunan daerah maka pengembangan pariwisata menjadi salah satu program program unggulan di daerah.

Menurut (Fatah & Yuniningsih, 2019) pariwisata harus direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan asli daerah melalui meningkatnya pengunjung atau wisatawan. Dalam rangka mencapai fokus tersebut, perlu dikaji faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan

pariwisata, agar pemerintah dapat menyusun perencanaan. Dalam rangka mencapai target tersebut, saat ini pemerintah kepulauan anambas sedang berfokus pada pembangunan sektor pariwisata (Wulung, 2021; Zaki & Pujiati, 2018). Hal tersebut sesuai dengan kebijakan perencanaan rencana strategis (Rippda 2021-2025) dalam mendorong dan mendukung pembanguann pariwisata kepulauan anambas.

2. Kajian Literatur Pengembangan Pariwisata

Menurut (Riani, 2021) Pariwisata merupakan suatu gejala modern yang didasari oleh kebutuhan akan kesehatan dan pergantian udara, penikmatan keindahan alam, dan kesenangan, dan disebabkan terutama oleh semakin meningkatnya interaksi berbagai bangsa dan meningkatnya perekonomian masyarakat sebagai akibat dari berkembangnya perekonomian. perdagangan, industri, dan transportasi.

Industri pariwisata saat ini berkaitan dengan perjalanan, kunjungan, dan aktivitas masyarakat ketika mereka melakukan perjalanan ke lokasi selain tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, budaya, atau pendidikan (Sutiarso, 2018) . Kegiatan yang dilakukan seperti menginap di hotel, makan di restoran, mengunjungi tempat wisata, berpartisipasi dalam aktivitas petualangan, dan berbaur dengan budaya dan lingkungan yang berbeda.

Pengembangan pariwisata merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan berbagai kawasan pariwisata di suatu wilayah atau negara dengan tujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata (Zaki & Pujiati, 2018). Pengembangan pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal (Amin et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan penyampaian (Djabbari, 2023) bahwa, pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat, karena menurut (Cahyandi, 2020) pariwisata merupakan industri multimedia yang memerlukan peran serta semua pihak. Di bawah ini beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan pengembangan pariwisata.

Menurut (Maturbongs, 2020) Di Indonesia, sektor pariwisata yang memberikan kontribusi

signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional merupakan salah satu alat penghimpun keuntungan devisa. (Suta & Mahagangga, 2018) Pariwisata menjadi gaya hidup atau aspek inti dari keinginan ketika kesejahteraan meningkat Walaupun begitu, masih banyak lokasi wisata yang memerlukan perhatian khusus agar bisa berkontribusi pada perekonomian nasional. Menurut (Sihite, 2023) Pemerintah dan pihak-pihak lainnya perlu menerapkan pengembangan pariwisata sebagai salah satu upaya dalam memajukan wisata disuatu daerah. Berdasarkan beberapa study yang dilakukan, berikut pengembangan pariwisata yang dapat dilakukan.

Tabel 1 Pengembangan Pariwisata

No	Author	Tourism Development Approach	Action
1	(Chaerunissa & Yuningsih, 2020)	Tourist Development Components are used to analyze tourist development in tourism villages.	To examine tourism development that is not yet ideal, use the 6A Tourism Development Components (Attraction, Accessibility, Amenities, Accommodation, Activity, Ancillary Service).
2	(Budhi Pamungkas Gautama et al., 2020)	A model of community empowerment is used in the construction of tourist villages	Model for community empowerment using the 7D method (Developing relation, Discovering capacities, Dreaming of community future, Directions of community actions, Designing community actions, Delivering Planned Activities, Documenting Outputs, Outcomes and Learning)
3	(Ramdhani et al., 2020)	SOAR Analysis Approach for Sharia Tourism Development in Bandung City	In developing tourism development strategies, SOAR analysis (strengths, opportunities, aspirations, results) is used to uncover internal and external elements.
4	(Wulung, 2021)	The spatial approach to the development of sustainable tourism destinations	The tourist origin area, internal route circulation, tourist entrance, tourist destinations, tourist area, primary care facilities, secondary service facilities, internal route circulation, primary tourist attraction, and secondary tourist attraction are among the spatial elements mentioned.
5	(Fitriyani et al., 2022)	SWOT Analysis Approach to Dusun Tourism Development	To discover elements that influence tourist development, a SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) is employed.

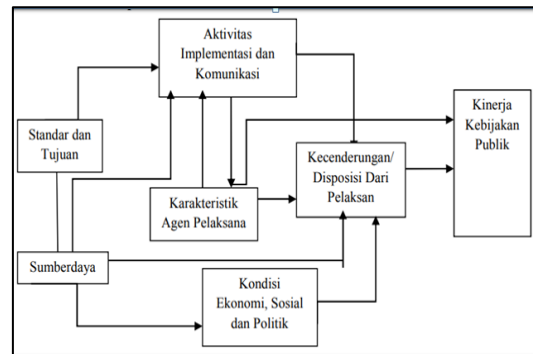
Sumber: (Wulung, 2021; Yuningsih et al., 2019, at all)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap paling penting dalam struktur kebijakan yang menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan dan memperoleh output serta outcomes yang diinginkan pada proses formulasi kebijakan (Suaib, 2016). Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari kebijakan publik yang menjadi bagian penting bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan (Abdal, 2018). Implementasi berhubungan dengan kebijakan bersifat spesifik yang merespon secara khusus pada masalah spesifik dalam masyarakat (Handoyo, 2012), Istilah dari

implementasi menunjukkan kegiatan dengan tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah yang menjadi tindakan bagi para aktor khususnya para birokrat sebagai bentuk berjalannya suatu program (Maghfirullah, 2020a).

Hakikat utama implementasi kebijakan dengan memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan (Maghfirullah, 2020) Pemahaman ini menunjukkan usaha dengan Model atau pengembangan yang lainnya juga disampaikan oleh (Ramdhani & Ramdhani, 2017) dan (Wahyuningsih, 2017) pengembangan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ada dua syarat yang dapat dijadikan unsur pertimbangan: pertama tipe kebijakan yang sedang dipertimbangkan, kedua, menentukan faktor yang mempengaruhi tujuan program tersebut. van meter dan horn menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu Sasaran, Komunikasi, Sumberdaya, karakteristik agen pelaksana dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Hubungan faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar2. Kerangka Faktor Implementasi Kebijakan

Sumber: (Maghfirullah, 2020)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (deskriptif). Deskripsi kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa yang berhubungan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan para pembuat dan Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam

penelitian ini ialah teknik Triangulasi, pertama, reduksi data, dalam tahap ini akan dilakukan pemilihan/penggolongan informasi yang dapat dijadikan sebagai Informasi data dalam tulisan ini, memilih hasil study yang relevan, memilih dari hasil dokumentasi dari media sosial dan hasil observasi. Kedua, display / penyajian data, data yang sudah dipilih dan hasil pemilihan yang relevan kemudian disusun secara terinci dan sistematis.

4. Hasil Dan Pembahasan

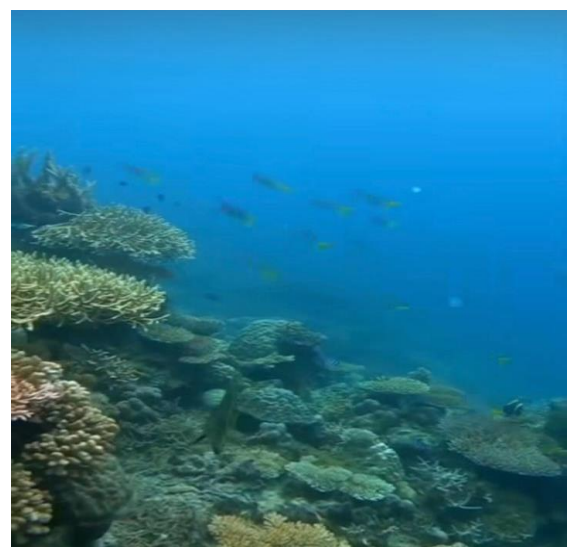
Melalui RIPPDA tahun 2021-2026, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Korridor Pariwisata Daerah (KPD) yang juga di rahkan pada fokus pengembangan pariwisata . Berdasarkan hasil penelitian impelementasi kebijakan pengembangan pariwisata dilihat dari beberapa aspek yaitu, standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Faktor pertama, sasaran dan target sesuai regulasi yang mengatur. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pengembangan pariwisata berstandar pada Rencana Strategis (Renstra) pariwisata yang disusun oleh Dinas Pariwisata sebagai pihak yang bertanggungjawab dibidang pariwisata. Keseriusan pemerintah dalam pengembangan kebijakan wisata bahari juga dapat dilihat Renstra yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Berdasarkan RIPOW pembangunan pariwisata daerah Kepulauan Anambas menembangkan Visi "Terwujudnya Kepulauan Anambas Sebagai Destinasi Wisata Bahari Terkemuka di Kepulauan Riau".

Berdasarkan visi tersebut kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan destinasi wisata bahari juga terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025. berdasarkan Perda tersebut terdapat destinasi unggulan daerah yang salah satunya menjadi objek pariwisata beberapa diantaranya pulau penjalin, pulau keolong, pulau tokong belayar, pulau durai, pulau piacuk, pulau semut, selat rangsag, pulau berhala, pulau mangkai, pulau damar.

Kepulauan anambas juga menjadi salah satu Pengembangan entry point wisatawan mancanegara dan asia tenggara yang kini sedang dalam upaya peningkatan. sedangkan dalam upaya peningkatan. sedangkan untuk sasaran dari standar tersebut berdasarkan hasil penelitian masih sulit dicapai dan diwujudkan hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya Standart Operasional Prosedur dalam pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga SOP menjadi salah satu kendala yang berpengaruh.

Keduan, Sumber daya. Dalam penelitian ini sumberdaya terdiri dari sumber daya Alam, sumber daya Manusia dan Sumber daya Finansial (anggaran). Berdasarkan penelitian sumber daya alam kepulauan anambas tersebar hampir disemua kecamatan. Di Kepulauan Anambas terdapat 3 Pulau Besar yaitu Pulau Tarempa, Pulau Jemaja (Letung) dan Pulau Siantan, pulau tersebut terdapat kecamatan, dan setiap kecamatan/pulau tersebut sumber daya alam pariwisata yang potensial yaitu Pantai Pasir Manag yang ada di Pulau tarempa, Pulau Bawah yang ada di Pulau Siantan, Pantai Padang Melang dan Pulau Durai yang ada di Letung/Jemaja. Berikut potret keindahan sumber daya alam anambas.



Gambar 1. Potensi Alam Anambas

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Anambas

Selanjutnya sumber daya Manusia, Berdasarkan penelitian sumber daya Manusia Pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan berjumlah 59 Orang dengan pendidikan minimal D3. dalam pengembangan kebijakan wisata bahari sudah optimal dari kuantitas dan tugas fungsi pokok sudah sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan masing-masing pegawai. Keberhasilan sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Anambas juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kebudayaan Anamabs, 2022 berikut Peningkatan kunjungan wisatawan

Tahun	Jumlah Kunjungan		
	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2019	108.680	625	109.305
2020	14.391	227	14.618
2021	24.177	33	24.210
2022	27.519	558	28.077

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan 2019-2022

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Anambas,2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisata yang datang ke kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 109.305 wisatawan, sedangkan pada Tahun 2020 dunia mengalami peristiwa munculnya virus covid-19 yang berdampak besar pada dunia pariwisata sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2020 hanya 14.618 wisatawan. Namun kunjunagn tersebut mulai mengalami peningkatan kembali dari Tahun 2021-2022 dengan peningkatan dari 24.210 menjadi 28.077.

Selanjutnya, dalam Sumberdaya Manusia melibatkan berbagai pihak hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata ialah industri multisektoral. Dibutuhkan koordinasi antara berbagai pihak, untuk mengembangkan wisata bahari berbasis digital pemerintah kepulauan anambas dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkoordinasi langsung dan membangun sinergitas dengan Sektor Swasta selaku pengelola objek wisata dan komponen

masyarakat sebagai pengelola dan pengawas.

Selanjutnya, sumberdaya Finansial, Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat dukungan baik dana bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata dan urusan bidang kebudayaan. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung		Rasio Target dan Realisasi Anggaran	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2019	4.552.943.550	4.004.036.143	11.051.494.000	10.278.448.237	0,88		0,93
2020	3.753.009.783	3.501.062.018	7.703.519.605	7.166.537.331	0,93		0,93
2021	4.232.496.417	3.478.036.029	2.981.683.616	358.800.000	0,82		0,12

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Anambas,2022

ImplementaiKebijakan Pengembangan selanjutnya dilihat dari komunikasi. Komunikasi dilihat dari Koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian dalam pengembangan wisata bahari berbasis digital terdapat koordinasi diantara beberapa pihak untuk mewujudkan wisata bahari, dalam menyusun perencanaan dan pemetaan kawasan-kawasan wisata.

Dinas pariwisata kebudayaan anambas berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam bentuk pengembangan akses jalan dan jembatan/dermaga dinas pariwisata kebudayaan anambas berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam kajian ekosistem dan kelestarian lingkungan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dalam pemberdayaan masyarakat

pesisir berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dalam bentuk pengamanan objek-objek wisata berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Selanjutnya karakteristik agen pelaksana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Terakhir implementasi dari aspek kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pengembangan wisata bahari berbasis digital. Berdasarkan hasil penelitian kondisi sosial masyarakat kurang memberikan dukungan dalam pengembangan wisata bahari berbasis digital hal tersebut dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang sadar wisata. Kelompok sadar masyarakat (Pokdarwis) belum berjalan optimal karena beberapa event/ kegiatan Pokdarwis Kabupaten Anambas tidak sepenuhnya berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan mayoritas nelayan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan daripada aktif dalam beberapa event.

Berdasarkan hasil penelitian Kondisi sosial masyarakat masih kurang memberikan dukungan dalam keikutsertaan pengembangan pariwisata maritim di kepulauan anambas, hal ini tampak dari keikutsertaan mereka dalam bentuk usaha-usaha kepariwisataan maritim yang pada objek-objek wisata maritim, perhatian akan kebersihan lingkungan alam maritim dan sebagainya. Selanjutnya kondisi politik memberikan dukungan dalam bentuk realisasi alokasi anggaran ekonomi bagi pengembangan kepariwisataan anambas secara umum.

5. Kesimpulan Dan Saran

Faktor yang paling mempengaruhi implementasi Pengembangan pariwisata

dapat dilihat Berdasarkan kebijakan Regulasi yang mengatur pariwisata Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010- 2025, yang di arahkan pada pembangunan pariwisata. Namun, dalam pengembangan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan pariwisata di Daerah Kepulauan Riau dinilai masih kurang terlihat dari pembangunan akses dan transportasi yang dinilai lambat. Meskipun sudah ada Bandara namun, dibutuhkan beberapa pelabuhan dan kapal untuk mengakses pulau-pulau tujuan wisata. Selama ini beberapa wisatawan mancanegara datang dengan pesawat air, yang tentunya tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya.

Kemudian dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik antara jajaran pemerintah dakam meningkatkan kunjungan wisatawan kepulauan anambas, seperti meningkatkan penggunaan Internet untuk memudahkan pertukaran informasi dan melakukan pemasaran yang dapat menarik minat masyarakat lokal dan mancanegara. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakuakn pendekatan terhadap masyarakat sebagai civil society yang dapat mendukung majunya pariwisata daerah kepulauan nambas dari sisi Kuliner, budaya yang diperkenalkan kepada wisatawan, serta dapat membantu melakukan promosi.

Daftar Pustaka

- Abdal, M. S. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK(Memahami Konsep Kebijakan Publik)* (P. 1). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Amin, M. S., R, M. G., P, D. D., & Erwin, E. (2020). *PARIWISATA DI BANYUWANGI Terpanjang Sehingga Bangunan Yang Dilanjutkan Input Data Pembebanan Komputer . Desain Struktur Ini Dilakukan (Struktur Rangka Pemikul Momen Dan Perhitungan Simpangan Yang Terjadi .* 2(2), 131–141.
- Amiruddin, A. (2017). *Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu.* 2(1), 26–32.
- Cahyandi, K. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Cilacap Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Maritim. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan*

- Pengabdian Masyarakat Polines*, 18–24.
<https://Jurnal.Polines.Ac.Id/Index.Php/Sentrikom/Article/View/2666>
- Edy Susanto, M. (2019). DIMENSI GLOBAL PARIWISATA: IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM INDUSTRI PARIWISATA. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fatah, A. N., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS). *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 53(9), 1689–1699.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1–315.
- Magfirullah, H. M. (2020a). *Teori Dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Brawijaya.
- Magfirullah, H. M. (2020b). *Teori Dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. July 2018, 12.
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63.
<https://doi.org/10.31334/Transparansi.V3i1.866>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Riani, N. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inobasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474.
- Sihite, H. Y. (2023). Pengembangan Desa Wisata Dengan Pendekatan Digital Tourism Pada Desa Wisata Kampung Terih Kec . Nongsa Batam. *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, 01, 17–22.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Suta, P. W. P., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144.
<https://doi.org/10.24843/Jdepar.2017.V05.i01.p26>
- Sutiarso, M. A. (2018). Sustainable Tourism Development Through Ecotourism. *OSFPreprint, September*, 1–11.
- Wahyuningsih, S. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY/AQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV/Aids) di KOTA SURAKARTA. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, V(2), 3.
- Wulung, S. R. P. (2021). Pendekatan Spasial Untuk Pengembangan Destinasi Pariwisata a Spatial Approach for the Development of Sustainable Tourism Destinations. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(2), 1–6.
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>
- Zaki, M. F., & Pujiati, A. (2018). Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Marina Tahun 2010 - 2015. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 207–213.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27876>